

**EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH
DASAR WILAYAH II KECAMATAN KEBAYORAN BARU**

TESIS

Disampaikan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh gelar Magister Pendidikan

Oleh

**MAULANA YUSUF
NIM. 1609087012**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
2019**

ABSTRAK

MAULANA YUSUF. “Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Tesis. Program Studi Magister Pendidikan Dasar, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. Februari 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar yang berada di Wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru, mencakup (1) kesesuaian penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan delapan Standar Nasional Pendidikan khususnya untuk pendidikan inklusif yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan, (2) mendeskripsikan berbagai hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, dan (3) solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala saat penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan pendekatan model *Discrepancy* (kesenjangan). Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar yang berada di Wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru kelas 1-6, dan guru pembimbing khusus yang berada di Sekolah Dasar yang berada di Wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar yang berada di Wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru belum sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan inklusif, yang mencakup pada kedelapan Standar Nasional Pendidikan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan, dengan tingkat pencapaian 40.34% yang berada pada kategori kurang baik dan tingkat kesenjangan 59.66% (2) hambatan yang dihadapi adalah tidak adanya Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan minimnya pemahaman guru reguler tentang pendidikan inklusif, sarana dan prasarana yang belum memadai bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dan (3) solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala tersebut adalah menyediakan elaborasi, memberikan pelatihan-pelatihan bagi guru-guru reguler tentang pendidikan inklusif, dan berkerjasama dengan pihak-pihak terkait agar dapat membantu pelaksanaan pendidikan inklusif.

ABSTRACT

MAULANA YUSUF. "Evaluation Of The Policy Of Inclusive Education In Primary School In II Area Of Kebayoran Baru Sub District, South Jakarta. Thesis. Master of Basic Education Study Program, Postgraduate School of Muhammadiyah University Prof. Dr. HAMKA. February 2019

This study aims to evaluate of the policy of inclusive education in primary school in II Area of Kebayoran Baru Sub District including (1) conformity with the implementation of inclusive education with eight National Education Standards specifically for inclusive education namely graduate competency standards, content standards, process standards, assessment standards , teacher and education staff competency standards, infrastructure facilities standards, management standards, and financing standards, (2) describe various obstacles in the implementation of inclusive education, and (3) solutions that can be done to overcome obstacles when implementing inclusive education.

This research is an evaluation study using the Discrepancy model approach. This research was conducted in elementary schools located in Region II, Kebayoran Baru Subdistrict. The research subjects were principals, grade 1-6 teachers, and special counseling teachers who were in elementary schools located in Region II of Kebayoran Baru Subdistrict. Data collection techniques using questionnaires, interviews, observation, and documentation.

The results of this study indicate that (1) the implementation of inclusive education policies in Primary Schools in Region II of Kebayoran Baru Subdistrict is not yet in line with the minimum service standards of inclusive education, which covers the eight National Standards of Education graduate competency standards, content standards, process standards, standards assessment, competency standards of teachers and education staff, facilities and infrastructure standards, management standards, and financing standards, with attainment rates of 40.34% in the poor category and a gap of 59.66% (2) the obstacles faced were the absence of Special Advisory Teachers and the lack of regular teacher understanding of inclusive education, inadequate facilities and infrastructure for special needs students, and (3) a solution that can be done to overcome these obstacles is to provide elaboration, provide training for regular teachers about inclusive education , and collaborating d with related parties in order to be able to help implement inclusive education.




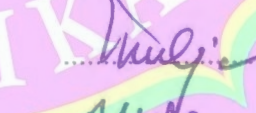
LEMBAR PENGESAHAN

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR WILAYAH II KECAMATAN KEBAYORAN BARU

TESIS

Oleh
MAULANA YUSUF
NIM 1609087012

Dipertahankan di Depan Penguji Tesis Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Tanggal 26 Februari 2019

Komisi Penguji Tesis	Tanda tangan	Tanggal
1. Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd (Ketua Penguji)		10/12 20
2. Prof. Dr. Hj. A. Suhaenah Suparno (Sekretaris Penguji)		20/12 19
3. Prof. Dr. Hj. A. Suhaenah Suparno (Anggota Penguji, Pembimbing 1)		20/12 19
4. Purnama Syaepurohman, P.hD (Anggota Penguji, Pembimbing 2)		13/12 19
5. Prof. Dr. H. Mulyono Abdurahman (Anggota Penguji 1)		13/12 19
6. Dr. H. Maskuri, M.Ed (Anggota Penguji 2)		19/12 19

Jakarta, 10 Desember 2019

Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA


Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Evaluasi	8
C. Perumusan Masalah Evaluasi	9
D. Kegunaan Hasil Evaluasi	10
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Kebijakan Publik	
1. Pengertian Kebijakan Publik	12
2. Implementasi Kebijakan Publik	13
B. Konsep Evaluasi dan Model Evaluasi yang Dipilih	
1. Konsep Evaluasi	14
2. Model-Model Evaluasi	17

3. Evaluasi Model <i>Discrepancy</i>	19
4. Tujuan Evaluasi.....	23
C. Pendidikan Inklusif	
1. Pengertian Pendidikan Inklusif	23
2. Landasan Pendidikan Inklusif	29
3. Manfaat Pendidikan Inklusif	32
4. Kriteria Pendidikan Inklusif.....	34
5. Kriteria Standar Pelayanan Minimum sekolah Inklusif.	63
D. Penelitian yang Relevan	85
E. Sinopsis	93
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	96
B. Tempat dan Waktu Penelitian	96
C. Subjek Penelitian.....	97
D. Metode Evaluasi dan Model Evaluasi	97
E. Kriteria Evaluasi	98
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	102
G. Validasi Instrumen	114
H. Teknik Analisis Data	115
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data.....	117
B. Pembahasan dan Evaluasi	125

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 207

B. Implikasi 208

C. Rekomendasi 209

DAFTAR PUSTAKA 212

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah kebutuhan dasar dan hak setiap manusia. Pendidikan memegang peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan perubahan dan perkembangan zaman yang selalu berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak manusia, pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional.

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemenuhan pendidikan bagi setiap manusia di Indonesia adalah merealisasikan penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang berkualitas bagi semua anak di Indonesia. Program penuntasan wajib belajar sembilan tahun memiliki arti yang strategis untuk mencerdaskan bangsa dan selaras dengan pesan dari Pendidikan Untuk Semua (PUS). Pendidikan untuk semua memiliki arti setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa memandang perbedaan dari setiap karakteristik manusia. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah diamandemen, memberikan jaminan seperti yang tercantum pada pasal 31, ayat (1) menyatakan bahasa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat (2) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam Undang-Undang tersebut memiliki makna bahwa setiap warganegara berhak

memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, dan etnis.

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penuntasan program wajib belajar sembilan tahun dengan prinsip pemerataan pendidikan tanpa memandang perbedaan adalah dengan adanya pendidikan Inklusif. Melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1986/ telah dirintis Pengembangan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang melayani penuntasan wajib belajar bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Kebijakan tersebut selaras dengan UU nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 32 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.”¹

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kelainan, berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, layanan pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Hal yang sama juga diperuntukkan bagi warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Mereka berhak memperoleh pendidikan khusus, dengan tujuan adalah untuk

¹ Dedy Kustawan. 2016. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta :Luxima, hal. 2

mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewannya.

Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan atau satuan pendidikan keagamaan. Pasal 130 ayat 2 PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa “penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan kejuruan diselenggarakan secara inklusif”².

Dengan diselenggarakannya pendidikan khusus secara inklusif di sekolah umum dan sekolah kejuruan, hal ini akan berpengaruh pada semua komponen yang terdapat di sekolah. Hal tersebut dikarenakan, pendidikan inklusif merupakan sebuah wujud dalam penegakkan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan, sehingga sekolah harus mempersiapkan segala kebutuhan dalam pemenuhan hak peserta didik.

Pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler/umum yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik, agar potensi semua peserta didik dapat tumbuh dan

² Dedy Kustawan. *ibid*. hal.4

berkembang secara optimal, hal tersebut dilakukan dengan melibatkan secara aktif berbagai lembaga terkait dan tenaga profesional.

Konsep pendidikan Inklusif melihat kebutuhan anak yang sangat luas, yaitu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Penyelenggaraan pendidikan inklusi diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat ke depannya. Akan tetapi ketidak sinkronan antara pihak sekolah sebagai pelaksana program dengan pemerintah sebagai pihak yang mencanangkan program menyebabkan munculnya permasalahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif masih sering terjadi. Hal ini menyebabkan sekolah tidak dapat melaksanakan program inklusif yang dicanangkan oleh pemerintah dengan baik dan sesuai dengan pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Saat ini pelaksanaan pendidikan inklusif menunjukkan perkembangan kuantitatif yang pesat. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program pendidikan inklusif di DKI Jakarta, maka Dinas Pendidikan DKI Jakarta menginstruksikan kepada semua sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Berdasarkan informasi direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar, rendahnya layanan anak berkebutuhan khusus disebabkan oleh³

³ Mudjito. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduose, hal. 13

1. Kurangnya tenaga pendidik yang mau dan mampu mendidik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
2. Sekolah juga belum siap memberikan aksesibilitas untuk pendidikan ABK
3. Kecilnya anggaran operasional yang disediakan Pemerintah Daerah untuk sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN Cipete Utara 15 Pagi, Jakarta Selatan. pada tahun ajaran 2014/2015 SDN Cipete Utara 15 Pagi dan sekolah dasar lainnya di DKI Jakarta sudah memiliki fungsi sebagai sekolah yang harus menerapkan pendidikan Inklusif. Hal tersebut sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pada SDN Cipete Utara 15 Pagi terdapat siswa yang termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus (ABK), bahkan disetiap kelas memiliki anak-anak Berkebutuhan Khusus. SDN Cipete Utara 15 Pagi, tidak memiliki guru pendamping khusus untuk anak-anak ABK, semua menjadi tanggung jawab Guru kelas, Guru Bidang *Study* dan Kepala sekolah dalam memberikan bimbingan kepada anak ABK. Permasalahan yang sering muncul dalam dalam proses pembelajaran, menurut Guru Kelas 1 SDN Cipete Utara 15 Pagi adalah interaksi pembelajaran di dalam kelas antar anak –anak normal dan ABK kurang berjalan dengan baik. Guru masih mengalami kesulitan dalam membangun interaksi yang baik antar anak-anak di kelas inklusif. Selain itu guru mengalami kesulitan dalam memberikan bimbingan akademik kepada

peserta didik ABK karena tidak adanya bantuan dari pihak lain seperti guru pendamping atau guru khusus untuk anak ABK.

Hasil observasi awal di SDN Cipete Utara 15 Pagi, dari segi kompetensi guru, belum seluruh guru memiliki kompetensi yang memadai mengenai pendidikan inklusif. Guru kelas hanya mengetahui ada anak yang berkelainan didalam kelas yang berbeda dengan anak normal lainnya akan tetapi guru terkesan tidak memahami layanan yang cocok bagi anak. Saat wawancara, penulis mendapatkan informasi bahwa pada umumnya di sekolah inklusif yang tidak ada Guru Pembimbing Khusus (GPK) nya, guru kelas merangkap sebagai GPK. Pelayanan untuk anak diberikan setelah anak pulang sekolah, dan nyatanya pun beberapa kali peneliti ke sekolah hingga sekolah usai, peneliti tidak melihat adanya pelayanan untuk anak yang diinkluskikan tersebut.

Selain itu dari segi kurikulum dan penilaian yang digunakan sekolah, peneliti melihat guru terkadang memberikan materi kepada semua siswa di dalam kelas termasuk ABK sama dengan anak normal lainnya. Hal ini membuat anak yang diinkluskikan tidak memahami pelajaran yang mereka terima karena kemampuan mereka tidak sama dengan anak normal. Hal ini terlihat jelas saat guru memberikan penjelasan, peserta didik ABK terlihat hanya melamun dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu pembelajaran. Dari hasil wawancara dengan guru, peneliti mengetahui juga bahwa penilaian yang digunakan oleh sebagian sekolah tidak disesuaikan dengan kondisi anak, dan dilakukan tidak berdasarkan pada prinsip penilaian pada anak-anak ABK

di sekolah inklusif. Data nilai yang peneliti dapatkan nilai anak ABK di sekolah sangat kurang dari Kriteria ketuntasan Minimal (KKM). Sebagai contoh KKM satuan pendidikan di SDN Cipete Utara 15 adalah 67. Peserta didik ABK di kelas I (satu) ada 2 peserta didik dan mendapat nilai 0 untuk hasil ujian tengah semester genap.

Meskipun saat ini semua Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta ditunjuk sebagai sekolah inklusi, tetapi dalam implementasinya masih banyak yang tidak sesuai dengan konsep-konsep yang mendasar, bahkan tidak jarang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan praktek terutama terkait dengan aspek pemahaman, kebijakan internal sekolah, kurikulum, serta tenaga kependidikan dan pembelajarannya.

Permasalahan di atas tentu saja menjadi perhatian khusus bagi praktisi pendidikan khusus guru. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mendapatkan informasi baru dari pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Berdasarkan alasan tersebut maka peneliti memilih penelitian evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam apakah pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar di wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru dengan kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif. Berangkat dari pemikiran ini maka evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar di wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran perbandingan pencapaian program dengan standar mengenai penyelenggaraan pendidikan

inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif sekolah dasar di wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru sesuai dengan standar pelayanan minimum sekolah inklusif.

B. Masalah Evaluasi

1. Fokus Evaluasi

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar yang berada di wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru yang mengacu pada kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif

2. Ruang Lingkup Evaluasi

Berdasarkan fokus evaluasi maka ruang lingkup evaluasi adalah sebagai berikut;

a. komponen-komponen yang terdapat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif yang termuat dalam Standar pelayanan minimum sekolah inklusif yang tercermin ke dalam 8 (delapan) Standar Pendidikan Nasional yaitu ;

- 1) Kompetensi Lulusan (Program pengembangan bakat, program kompensatoris dan pelaksanaan ujian Nasional (UN) bagi anak berkebutuhan khusus)
- 2) Isi (Pengembangan kurikulum dan penyusunan RPI sesuai dengan kondisi anak berkebutuhan khusus)
- 3) Proses (Penyesuaian pembelajaran, pendampingan GPK dan teman sebaya)

- 4) Penilaian (Penentuan Ketuntasan Kriteria Mininal (KKM) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), penyesuaian penilaian, dan pemberian Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bagi anak berkebutuhan khusus yang mampu menyelesaikan pendidikan)
 - 5) Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (Pelatihan guru reguler tentang pendidikan inklusif dan latar belakang pendidikan Guru Pembimbing Khusus (GPK)
 - 6) Sarana Prasarana (Aksesibilitas fisik dan non fisik)
 - 7) Pengelolaan (Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), kebijakan sekolah dan laporan perkembangan sekolah oleh kepala sekolah secara sistematis)
 - 8) Pembiayaan (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS), dana tambahan dan pelaporan dana)
- b. Kendala atau hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar yang berada di wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru

C. Perumusan Masalah Evaluasi

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah dasar yang berada di wilayah II

Kecamatan Kebayoran Baru sudah sesuai dengan Kriteria Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif ?

2. Faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah dasar yang berada di wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah dasar yang berada di wilayah II Kecamatan Kebayoran Baru?

D. Kegunaan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi ini berguna untuk masukan dan perbaikan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan juga untuk menambah khasanah ilmu evaluasi baik secara praktis maupun teoritis. Adapun kegunaan hasil evaluasi secara rinci adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan :

- a. Menjadi penyumbang pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan inklusif.
- b. Menjadi referensi guna mendapatkan manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah di dapat selama menempuh pendidikan dan

menerapkan pada kasus nyata di lingkungan khususnya mengenai kebijakan pendidikan inklusif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan sebagai berikut;

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi pemegang kebijakan dalam menindaklanjuti kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar, agar pelaksanaan pendidikan inklusif sesuai dengan standar pelayanan minimum pendidikan inklusif.
- b. Untuk memperbaiki penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di Provinsi DKI Jakarta .
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi pemimpin, praktisi pendidikan dan orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K. Mudjito dan Harizal. 2012. *Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Baduose Media
- Abd, Rahman A. Ghani . 2009. *Mengurai Simpul Pendidikan*. Jakarta: Uhamka. Press
- Abdul Majid, 2014. *Evaluasi Kinerja SDM*. Jakarta: Haja Mandiri
- Afrina Devi Marti. *Pendidikan Inklusif Disekolah Dasar Kota Padang*.Volume 1 Nomor 3 September 2012 E-JUPEKhu (Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus) <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu>
- Allen, K. Eillen. (1980). *Mainstreaming in Early Childhood Education*. New York, USA : Delmar Publisher Inc.
- Anas Sudijono. (2008). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Armansyah.2009. *Perspektif Pendidikan Inklusif Pendidikan Untuk Semua*, Padang:UNP Press, Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Study Kasus*. Yogyakarta: Centre for Academic Publishhing.
- Budiyanto. 2005. *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Dadan Rachmayana, 2013. *Menuju Anak Masa Depan yang Inklusif*, Jakarta : PT Luxima Metro media.
- Deden Saepudin. 2013. *Pengembangan SLB sebagai Pusat Sumber Belajar*, Jakrta: PT Luxima Metro Media
- Dedi Kustawan. 2013. *Model Pembelajaran Inklusif*, Jakarta:PT. Luxio Metro Media
- Dedy Kustawan. 2012. *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya*. Jakarta: PT Luxima Metro Media
- Dedy Kustawan. 2013. *Manajemen Pendidikan Inklusif*, Jakarta: PT. Luxima Metro Media
- Dedy Kustawan. 2016. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta :Luxima

- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. 2007. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan inklusi* . Jakarta : Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, hal. 3-4
- Wahyu Sri Ambar Arum. 2005. *Perspektif Pendidikan Luar Biasa dan Implikasi bagi penyiapan Tenaga Kependidikan* . Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Nasional,
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar dan Menengah Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa. 2004. *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Khusus: Pengadaan Kegiatan Belajar Mengajar*. Jakarta : Ditrektorat jendral Pendidikan dasar dan menengah
- Direktorat Pendidikan luar Biasa. 2004. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Khusus Pengadaan dan Pembinaan TENAGA Kependidikan*. Jakarta : Direktorat Jendral pendidikan Dasar dan Menengah
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa. 2007. *Pedoman Penyelenggaran Pendidikan Khusus Terpadu/Khusus Pengadan dan Pengelolaan Sarana dan parasarana*. Jkarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
- Direktorat PLB. 2004. *Pedoman Penyelenggaraan pendidikan Terpadu / Khusus: Pengembangan Kurikulum*. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
- Djali dan Puji Muliono. 2008. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, jakarta: Garasindo
- Echols, Jhon M dan Hasan Sadily. 2000. *Kamus bahasa Inggris-Indonesia* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Eko putro Widoyoko. (2009). *Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Fernandes. (1984). *Evaluation of Educational Program*. Jakarta : BP3K
- Hari Setiadi, Abd. Rahman, A. Ghani, Suyatno. 2006. *Evaluasi Pendidikan Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Uhamka Press
- Ina Agustin FKIP, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. *Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Sumber Sari 1 Kota Malang*. Education and Human Development Journal, Vol. 01. No. 01, September 2016

- Kemendiknas. 2010. *Modul Pelatihan Pendidikan Nasional*. Cetakan pertama
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indoensia*. Jakarta: Kemendikbud
- Lay kekeh marthan . 2007. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Mohammad Takdir Illahi. (2013). *Pendidikan Inklusif : Konsep dan Aplikasi*.
- Mudjito. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduose
- Mulyono Abdurrahman. 1995. *Pendidikan Bagi anak Bekerulitan Belajar*. Jakarta: departemen Pendidikan dan kebudayaan
- Oemar Hamalik. 2006. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Pedoman penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
- Peraturan Pemerintah. 2005. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan* .Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Richard A. Villa & Jacqueline S. Thousand. (2005). *Creating an Inclusive School*.second edition. USA : ASCD
- Sarlito W. Sarwono. 1999. *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sudiby Setyobroto. 2003. *Psikologi Sosial Pendidikan*. Jakarta: PT. Solo
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung. Alfabeta
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2004. *Evaluasi Program pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksaea
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi askara
- Sunardi. 1996. *Kecenderungan dalam Pendidikan Luar Biasa*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

- Suyatno. 2012. *Masa Depan Pendidikan Inklusif*. Jakarta : Direktur Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Tarmansyah.2007. *Inklusi:Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Tim ASB. (2011). *Panduan I : Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusi*. Yogyakarta : Dinas Dikpora DIY dan ASB Indonesia
- Umar Tirtahardja. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta:PT. Rineka Cipta
- Wahyu Sri Ambar Arum. 2005. *Perspektif Pendidikan Luar Biasa dan Implikasi bagi Penyiapan Tenaga Kependidikan*. Jakarta : direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Nasional
- Winda Quida Sari. *Pelaksanaan Inklusi Disekolah Dasar Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh*. Volume 1 Nomor 1 Januari 2012 E-JUPEKhu (Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus) <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu>
- Wirawan. 2012. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada
- WS. Winkel. 2004. *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta: Media Abadi